

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA TAMBAHAN
KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN
SEWA-MENYEWA KENDARAAN**

(Studi Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk di Munaqosahkan Dalam Memenuhi Tugas Dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
ilmu Syariah**

Oleh:

GESTA GAMA SEVIA

NPM: 1221030055

Jurusan: Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA TAMBAHAN
KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN
SEWA-MENYEWA KENDARAAN**

(Studi Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk di Munaqosahkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syariah



Oleh:

Gesta Gama Sevia

NPM: 1221030055

Jurusan: Muamalah

Pembimbing I: Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

Pembimbing II: Agustina Nurhayati, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman di era modern ini, sarana transportasi sangat penting dan diperlukan untuk menunjang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena keterbatasan dan kemampuan setiap orang berbeda-beda sehingga tidak semua masyarakat memiliki mobil maka bisnis jasa sewa-menyewa mobil bermunculan. Salah satunya adalah CV. Bintang Angkasa Rental yang merupakan salah satu perusahaan jasa rental terbesar di Kota Bandar Lampung. Sistem sewa-menyewa dengan lepas kunci menjadi layanan yang paling diminati, meskipun memiliki resiko yang salah besar salah satunya adalah karena penyewa terlambat dalam mengembalikan kendaraan yang disewa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang biaya tambahan keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, sejauh mungkin mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung dan menganalisis menggunakan Hukum Islam terhadap biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan tiga tahapan prosedur penelitian yakni tahapan deskripsi dan orientasi, tahapan reduksi, dan tahap seleksi. Desain penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan juga sumber referensi dari buku buku yang terkait. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung dituangkan kedalam sebuah perjanjian yang bersifat baku (standar) sepihak namun isi dalam isinya tetap adil, tidak merugikan pihak penyewa mobil atas syarat dan ketentuan yang dibuat. 2) Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung tidak melanggar ketentuan yang disyariatkan sebab pengenaan biaya tambahan bagi penyewa yang terlambat mengembalikan kendaraan sewaan tidak mengandung unsur riba



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

SURAT PERYATAAN

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : _____

Nama : Gesta Gama Sevia
NIM : 1221030055
Jurusan/Prodi : Muamalah / Hukum Ekonomi
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan (Studi Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 27 Desember 2019

Penulis



Gesta Gama Sevia
NPM: 1221030055



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : **Gesta Gama Sevia**

Npm : **1221030055**

Jurusan : **Muamalah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan
Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa
Kendaraan (Studi Pada CV. Bintang Angkasa Rental
Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

NIP. 195411131985031001

Agustina Nurhayati, S.Sos., M.H.

NIP. 197408162003122004

Mengetahui
Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan (Studi Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)"** ditulis oleh **Gesta Gama Sevia**, NPM 1221030055 Program Studi **Muamalah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada hari/tanggal : Jum'at, 27 Desember 2019.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

Penguji Utama : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Penguji Pendamping I: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing I : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Papahku Maizar Surya BBA dan Mamahku Eviana Muchtar BBA, yang dengan do'a dan kasih sayangnya selalu memberi dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan perkuliahanku.
2. Kakakku dan adikku yang selalu memotivasi, beserta keluarga besar yang tercintai, terimakasih atas dukungan dan motivasinya, kalianlah keluarga terbaik yang Allah SWT. Berikan kepadaku.
3. Kepada pembimbing I Bapak Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I. dan pembimbing II Ibu Agustina Nurhayati, S.Sos., M.H. yang telah memimbing, memotivasi serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Kepada Ahmad Wahyudi yang menemani dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Sahabat-sahabat ku yang telah membantu dan menemaniku untuk menyelesaikan skripsi.
6. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan yang selalu kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Gesta Gama Sevia adalah anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Ayahanda Maizar Surya dan Ibunda Eviana Muchtar . penulis dilahirkan pada tanggal 30 September 1994.

Pendidikan pertama dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 sukarama Bandar Lampung selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 24 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2009, Dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Selesai pada Tahun 2012.

Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Angkatan tahun 2012.



Bandar Lampung Desember 2019 yang
Membuat

Gesta Gama Sevia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN SEWA-MENYEWA KENDARAAN (Studi di CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung)".

Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 di jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga:

1. Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan keritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT. Menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis

GESTA GAMA SEVIA
NPM: 1221030055

DAFTAR ISI

Halaman

COVER JUDUL LUAR.....	i
COVER JUDUL DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Teori Sewa Menyewa.....	15
a. Syarat dan Ketentuan Sewa-Menyewa.....	21
b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	24
c. Mekanisme Perjanjian Sewa-Menyewa	26
2. Teori Biaya.....	27
3. Sewa Menyewa dalam Islam.....	30
a. Dasar Hukum Sewa Menyewa dalam Islam	31
b. Mekanisme Sewa-Menyewa dalam Islam.....	36
c. Syarat dan Rukun Sewa-Menyewa	41
d. Keterlambatan Pengembalian Barang Sewaan dalam Islam	45
B. Tinjauan Pustaka	49

BAB III	GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN BIAYA TAMBAHAN KETERLAMBATAN KENDARAAN CV BINTANG ANGKASA RENTAL	
A.	Gambaran Umum CV. Bintang Angkasa Rental	
1.	Sejarah Berdirinya CV. Bintang Angkasa Rental	52
2.	Visi dan Misi CV. Bintang Angkasa Rental	55
3.	Struktur Organisasi CV. Bintang Angkasa Rental	56
B.	Mekanisme Perjanjian Rental di CV. Bintang Angkasa Rental	58
C.	Mekanisme Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung	62
D.	Biaya Tambahan Sewa pada CV. Bintang Angkasa Rental	67
BAB IV	ANALISIS DATA	
A.	Analisis Mekanisme Biaya Tambahan Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung	75
B.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung	79
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	86
B.	Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN-LAMPIRAN		92
1.	Catalan Lapangan Hasil Observasi	
2.	Pedoman Wawancara	
3.	Catatan Lapangan Hasil Wawancara	
4.	Hasil Wawancara	
5.	Surat Keterangan Wawancara	
6.	Kartu Konsultasi	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Daftar Harga Sewa Kendaraan di CV. Bintang Angkasa Rental Per Hari Tahun 2019	57
2. Biaya Keterlambatan atau Denda Pengembalian Kendaraan Per Jam di CV. Bintang Angkasa Rental	69



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi CV. Bintang Angkasa Rental.....	52
2. Analisis Mekanisme Biaya Tambahan Sewa-Menyewa Kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian ini, yang berakhir dengan kesalahpahaman, maka dengan ini penulis akan menjelaskan secara singkat apa yang sebenarnya menjadi maksud dari judul penelitian ini. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kendaraan (Studi Pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung)”**, maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.

Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul-Nya tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama.²

Biaya tambahan adalah biaya yang masih harus dikeluarkan diluar biaya tepatnya.³

Menurut bahasa, kata sewa-menyewa berasal dari kata “sewa” dan “menyewa”. Kata sewa berarti pemakaian suatu barang dengan membayar uang sewa, sedangkan menyewa berarti memakai suatu barang dengan

¹W.J.S Purdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1992), h. 197.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Logos Wacana Ilmu* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 5.

³*Ibid.*

membayar uang sewa.⁴ Dalam bahasa arab, sewa diistilahkan dengan *al-ijarah* yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan.⁵

Menurut Moh Ali Hasan, *Ijarah* merupakan suatu perikatan pemberian kemanfaatan jasa kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (pengganti/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan. Jadi *Ijarah* membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.⁶

Kendaraan merupakan sarana tertentu yang digunakan untuk melakukan kegiatan berpindah tempat terhadap manusia maupun barang dengan tujuan tertentu.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan meneliti serta menemukan hasil tentang biaya keterlambatan atas sewa menyewa yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen pada CV. Bintang Angkasa Bandar Lampung akibat keterlambatan waktu pengembalian kendaraan, ditinjau dari hukum islam.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis memiliki beberapa alasan tertentu yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah ini. Adapun alasan ini antara lain :

1. Alasan Obyektif

CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung merupakan salah satu usaha sejenis perorangan yang bergerak dibidang sewa-menyewa mobil rental.

⁴Hasal Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III* (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), h. 1057.

⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

⁶ *Ibid.*

⁷Mikha Ekapasi Putra Kawangmani, "Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dampak Ekonomi dan Potensi Lakalantas", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan (JIEP)*, Vol. 17, No. 1, (Maret 2017).

Peraturan yang ditetapkan oleh pihak CV. Bintang Angkasa dalam kegiatan sewa-menyewa mobil rental adalah mutlak, termasuk dengan dikenakannya biaya tambahan apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian unit mobil yang disewakan.

Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis akan membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung.

2. Alasan Subyektif

- a. Dalam penulisan skripsi ini, penulis didukung oleh data yang akurat yang terdapat di perpustakaan maupun yang diperoleh dari lapangan sebagai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian, sehingga diperkirakan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- b. Ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data sekunder maupun data primer memiliki kemudahan akses dan letak objek penelitian mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman di era modern ini, sarana transportasi sangat penting dan diperlukan untuk menunjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya sarana transportasi yaitu untuk mengefisiensikan waktu di kalangan masyarakat baik itu bekerja, pelajar, atau mahasiswa. Dapat diasumsikan bahwa, hampir semua masyarakat memiliki kendaraan roda empat yaitu mobil.

Namun demikian sangat mungkin pula ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak memiliki alat transportasi berupa mobil, seperti yang kita ketahui bahwa mobil merupakan suatu kendaraan yang digerakkan dengan tenaga mesin, selain itu mobil termasuk dalam kategori barang yang mahal sehingga hal ini tidak menyebabkan semua orang dapat memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Hal ini membuat kondisi di bidang perekonomian banyak bermunculan bisnis dalam bidang persewaan terutama di bidang jasa transportasi yaitu sewa-menyewa mobil rental.⁸

Sudah banyak perusahaan berbadan hukum seperti CV maupun PT ataupun bisnis perorangan yang melakukan kegiatan sewa-menyewa mobil untuk mendapatkan keuntungan, yang menyediakan berbagai jenis mobil yang disewakan dengan harga yang bervariasi, sehingga para penyewa tersebut dapat memilih mana yang diminati dengan harga sewanya yang terjangkau. Selain itu, para penyewa juga dapat mempertimbangkan kebutuhan mobil yang mereka sewa nantinya.

Untuk menyewa dan mendapatkan fasilitas kendaraan roda empat yaitu mobil, tentunya terdapat persyaratan tertentu yang ada pada perjanjian sewa, yaitu bahwa penyewa adalah orang yang berpengalaman mengemudi dan memiliki SIM A, KTP, jenis mobil yang disewakan, ketentuan harga sewa. Ketentuan harga sewa pada CV. Bintang Angkasa yang penulis dapatkan dari hasil penelitian dari hasil pra riset adalah sebagai berikut:

⁸Ni Putu Dian Pradnyawati, Ratna Arta Windari, Ketut Sudiarmaka, "Akibat Hukum Terjadinya Wanpretasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di Kabupaten Klungkung", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2008).

CV. Bintang Angkasa memiliki beberapa unit mobil yang dapat disewakan kepada masyarakat, diantaranya Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia masing-masing sebanyak 2 unit dengan biaya sewa dengan sistem lepas kunci sebesar Rp 250.000,-/hari, Kijang Innova sebanyak 2 unit dengan biaya sewa sebesar Rp 350.000,-/hari, Toyota Fortuner dan Minibus Isuzu sebanyak 1 unit dengan biaya sewa sebesar Rp.500.000,-/hari, dengan syarat yang berbeda-beda. Tetapi, adanya syarat tersebut tidak menjamin bahwa bisnis sewa-menyewa mobil berjalan dengan baik, karena pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan seperti yang diketahui bahwa pihak penyewa tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti disepakati dalam perjanjian awal.

Permasalahan pertama yang terjadi di CV. Bintang Angkasa adalah bahwa pihak dari penyewa mobil tidak tepat dalam mengembalikan mobil pada waktunya sesuai dengan isi dalam perjanjian. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan, karena dalam perjanjian sewa-menyewa ditentukan waktu tertentu. Waktu tertentu adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya jumlah jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Maka dari itu pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan atas keterlambatan pengembalian unit mobil yang disewa. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana hukum Islam dalam meninjau biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan, yang pada notabennya setiap kata “tambahan” selalu dikaitkan dengan istilah “riba”.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa

Kendaraan (Studi di CV. Bintang Angkasa, Teluk Betung Selatan, Kupang, Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap biaya tambahan keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung secara lebih mendalam lagi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang biaya tambahan keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis penggunaan hukum Islam terhadap biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa kendaraan dan mekanisme pelaksanaan sewa menyewa kendaraan.

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstibusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya bagi pemilik usaha akan dapat menambah pengetahuan tentang sewa-menyewa dan biaya keterlambatan yang ditinjau dari hukum Islam.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan mekanisme perjanjian sewa-menyewa kendaraan serta tinjauan hukum Islam tentang biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum muamalah khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sesuatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁹ Penelitian harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai mekanisme biaya tambahan keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan di CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung .

Selain menggunakan penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga mencakup penelitian kepustakaan (*library research*), yang dipakai sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dimana digunakan berbagai berbagai literatur (kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu)¹¹, yang relevan dengan masalah terkait biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa untuk kemudian diangkat dan diteliti.

⁹Kartini Kartono, *pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h. 32

¹⁰*Ibid*, h. 54.

¹¹ *Ibid*,

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak.¹² Jadi jenis penelitian ini berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.¹³

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.¹⁴ Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai mekanisme biaya tambahan pengembalian sewa menyewa kendaraan dalam perspektif hukum Islam.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subyek yang diteliti, populasi disebut juga *univers* tidak lain dari daerah generalisasi yang

¹²Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), Cet. Ke-8, h.63.

¹³Kantini Kantono, h. 78

¹⁴*Ibid.*

diwakili oleh sampel.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan office CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung yang berjumlah 10 orang dan 15 penyewa yang melakukan keterlambatan pengembalian kendaraan pada tahun 2019.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode *purpose sampling* atau sampel yang *purposive* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan menjadi narasumber adalah sebanyak 3 orang pegawai CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung dan 4 penyewa yang melakukan keterlambatan pengembalian kendaraan yakni Bapak Wahyudi, Bapak Yudi, Bapak Mahmud dan Ibu Anggita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *interview* atau wawancara.

a. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya

¹⁵Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logis, 1997), h.83.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 104.

jawab terarah untuk mengumpulkan data relevan saja. Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan wawancara kepada ialah Pimpinan atau *owner* CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung, staff *customer service*, dan bendahara yang merupakan orang yang mengetahui segala informasi terkait CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung serta satu orang penyewa yang melakukan keterlambatan pengembalian kendaraan sewa.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.¹⁷ Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti turun langsung mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian yaitu CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung Bandar Lampung. Dalam pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

¹⁷Sugiyono, *Ibid*, h.227.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁸

Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan sewa-menyewa kendaraan di CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung

4. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, maka sumber data ini termasuk sumber data sekunder dan primer, yaitu :

- a. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁹ Sumber data primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara dengan informan dan juga hasil dokumentasi yang penulis dapatkan dari CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung.
- b. Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informatif.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 44.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan,²¹ dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²² Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.²³ Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Mekanisme Biaya Tambahan Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung

Analisis mekanisme perjanjian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung dilakukan dengan melihat isi perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara pihak CV. Bintang Angkasa Rental dengan pihak penyewa.

²⁰Sugiyono, *Ibid*, h.335.

²¹*Ibid*.

²²Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bandung, 2004), Cet.I, h.127.

²³Susiadi, AS., *Metode Penelitian* (Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.106.

b. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung

Analisis Tinjauan hukum Islam tentang biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder terkait dengan akad *ijarah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan sewa-menyewa kendaraan dengan sistem lepas kunci.

Penyusun juga menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁴ Dalam mengolah hasil data penyusun menggunakan metode pendekatan secara *induktif* yakni berangkat dari fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya penyusun akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

²⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing , 2006), h. 295.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Sewa Menyewa

Sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut menyanggupi pembayaran nya.²⁵

Sewa-menyewa dalam bahasa inggris disebut dengan *Rent* atau *Hire*. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.²⁶

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.²⁷

Menurut Subekti, sewa menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar

²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata* (Jakarta: PT.Pradya Paramita, 2008), h.381.

²⁶ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), h. 354.

²⁷ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2008), Cet. Ke.7, h. 6.

harga yang sudah ditetapkan untuk pemakaiannya itu pada waktu waktu yang sudah ditentukan.²⁸

Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa-menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.²⁹

Sewa-menyewa menurut pasal 1548, Bab VII KUHPerdato menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tertentu belakangan menyanggupi pembayarannya.³⁰

Sewa-menyewa sama saja halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, yaitu suatu perjanjian konsensual, artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu Barang dan Harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa. Jadi, barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki.³¹

²⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1975), h.48.

²⁹ Wiryono Prodjodikoro H., *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1981), Cet Ke. 7, h. 49.

³⁰ KUHPerdato Bab VII Pasal 1548 terkait sewa menyewa.

³¹ M.Yahya Harahap, *Ibid*, h. 8.

Dengan demikian, maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atau sementara atas barang yang disewa itu. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya untuk menyerahkan hak milik atas barang itu, dengan demikian maka seseorang yang memiliki hak nikmat-hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasai nya dengan hak tersebut.³²

Dalam buku hukum perdata Indonesia oleh prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. beliau menerangkan bahwasanya seperti yang sudah diketahui sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu (pasal 1548 KUHPdt)³³ Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diidentifikasi empat unsur utama sewa-menyewa, yaitu subjek sewa-menyewa, perbuatan sewa-menyewa, objek sewa-menyewa, dan jangka waktu sewa-menyewa.³⁴

a. Subjek sewa-menyewa

Istilah sewa-menyewa menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut “yang menyewakan” yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa dan pihak kedua disebut “penyewa”, yaitu pihak yang membutuhkan

³²*Ibid.*

³³Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya, 2010), h. 11.

³⁴*Ibid*, h, 12-15.

atas suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar menawar. Pihak pertama yang menyewakan dan pihak kedua yang penyewa.³⁵

Sewa menyewa dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk sekedar memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu. Akan tetapi secara khusus, sewa-menyewa dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak yang menyewakan benda. Dalam hubungan ini, pihak yang menyewakan benda dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen, sedangkan pihak penyewa dapat sebagai manusia pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati benda.³⁶

b. Perbuatan sewa-menyewa

Perbuatan sewa-menyewa meliputi lima unsur, yaitu persetujuan, penyerahan benda sewaan, pembayaran uang sewa, waktu sewa dan persyaratan dalam melakukan sewa-menyewa adalah persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mengenai benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa.³⁷

Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati.³⁸ Pembayaran uang sewa adalah perbuatan memberikan

³⁵Subekti, *Ibid*, h. 49.

³⁶*Ibid*.

³⁷Wiryono Prodjodikoro H, *Ibid*, h. 10.

³⁸*Ibid*.

sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai kontra prestasi atas benda yang dikuasai untuk dinikmati oleh pihak penyewa.³⁹

Waktu sewa adalah ukuran lamanya sewa-menyewa berlangsung. Persyaratan sewa-menyewa adalah ketentuan yang disepakati bersama untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.⁴⁰

c. Objek sewa-menyewa

Objek sewa-menyewa adalah benda dan sewa, benda yang menjadi objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, harus benda tertentu atau dapat ditentukan, dan benda itu memang benda yang boleh disewakan atau diperdagangkan.⁴¹ Dengan demikian benda yang disewakan itu status nya sah dan jelas menurut hukum, diketahui jelas oleh calon penyewa atas tawaran dari pihak yang menyewakan, dan didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, calon penyewa yang jujur tidak mencurigai benda sewaan tersebut. Harga sewa selalu dinyatakan oleh jumlah uang, tetapi bleh juga dinyatakan berupa benda atau jasa.

d. Jangka waktu sewa-menyewa

Jangka waktu sewa-menyewa dalam Pasal 1548

KUHPdtdinyatakan dengan “waktu tertentu”. Apa yang dimaksud

³⁹*Ibid*, h. 11.

⁴⁰*Ibid*, h. 12.

⁴¹ Subekti, *Ibid*, h. 50.

dengan waktu tertentu? dalam praktik sewa-menyewa, yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya jumlah jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Jangka waktu tersebut dapat juga digunakan dalam bentuk carter, baik carter menurut waktu maupun carter menurut perjanjian. Waktu tertentu ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan lamanya sewa-menyewa berlangsung, jumlah uang sewa, saat pembayaran sewa, dan berakhirnya waktu sewa.⁴²

Menurut ketentuan Pasal 1579 KUHPdt, pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa-menyewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri benda yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya.⁴³ Pasal ini ditujukan dan hanya dapat diberlakukan pada sewa-menyewa dengan waktu tertentu. Contohnya orang yang sudah menyewakan bendanya untuk jangka waktu tiga tahun tidak dapat memutuskan sewa-menyewa jika jangka waktu tersebut belum berakhir walaupun dengan hendak memakai sendiri benda yang disewakan itu.

Akan tetapi, apabila pihak yang menyewakan benda itu tidak menentukan jangka waktu sewa, dia berhak menghentikan sewa-menyewa setiap saat dengan mengindahkan waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan penghentian sewa menyewa menurut kebiasaan setempat. Namun, ketentuan sewa-menyewa yang diatur dalam Buku

⁴²Subekti dan Tjitrosudibio, *Ibid*, h. 382.

⁴³KUHPperdata, *Ibid*, Pasal 1579 terkait sewa menyewa.

III Bab VII KUHPdt berlaku untuk semua sewa-menyewa benda bergerak dan tidak bergerak, untuk waktu tertentu dan tidak tertentu karena waktu tertentu bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa.⁴⁴ Untuk mengetahui jangka waktu tertentu berlakunya sewa-menyewa, ada beberapa cara yaitu⁴⁵:

- 1) Kepastian jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
- 2) Tarif sewa untuk setiap unit waktu.
- 3) Penafsiran Pasal-Pasal tertentu dalam peraturan sewa-menyewa

a. Syarat dan Ketentuan Sewa-Menyewa

Menurut pasal 1548 KUHPdata

"Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun bergerak".⁴⁶

Mengingat kembali bahwa sewa menyewa itu suatu perjanjian yang konsensual, yang artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa Syarat dan Ketentuan dari Sewa-menyewa itu adalah⁴⁸:

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Subekti dan Tjitrosudibio, *Ibid*, h. 383.

⁴⁶KUHPdata, *Ibid*, Pasal 1548 terkait Sewa Menyewa.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Subekti dan Tjitrosudibio, *Ibid*, h. 384-386..

1) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, adanya Konsensus dari kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa, yaitu barang baik bergerak maupun tidak bergerak, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

2) Subjek dan objek sewa menyewa, subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, pihak yang menyewakan adalah orang yang menyewakan barang atau benda kepada penyewa sedangkan penyewa adalah orang yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau benda dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

3) Hak dan Kewajiban yang menyewakan

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut:

a) Barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik

- b) Barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik dan yang rusak wajib diperbaiki (apabila hal tersebut menjadi tanggung jawab nya).
- c) Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlaku perjanjian sewa menyewa.
- d) Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalang-halangi pemakaian bendaitu, walaupun ia sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut.

4) Hak dan Kewajiban penyewa

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a) Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan
- b) Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan.
- c) Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri.
- d) Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah habis waktunya
- e) Tidak boleh menyewakan lagi barang yang sewanya kepada orang lain. Apabila telah ditentukan demikian, maka perjanjian

dapat dibatalkan dan penyewa dapat dituntut mengganti perongkosan, kerugian serta bunga.

- 5) Bentuk dan substansi perjanjian sewa menyewa, KUHPdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak .perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Adapun substansi sewa menyewa minimal membuat hal hal sebagai berikut, tanggal dibuat nya sewa menyewa, subjek hukum, objek yang disewakan, jangka waktu sewa, besarnya uang sewa, hak dan kewajiban masing masing pihak dalam perjanjian tersebut, dan dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda serta resiko atas musnahnya barang atau batalnya perjanjian.

b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

1. Dasar Hukum yuridis

Alasan yuridis adalah alasan yang berpangkal pada dasar hukum yang menjamin mereka untuk dapat mendirikan usaha bersama dalam bentuk sewa menyewa (rental), beberapa pasal yang terkait dalam kitab undang undang hukum perdata tentang sewa menyewa.⁴⁹

2. Pasal 1320 KUHPdata

Dalam sewa menyewa tentu saja didasari dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang mana sudah diatur dalam

⁴⁹Subekti dan Tjitrosudibio, *Ibid*, h. 382..

KUHPperdata buku ketiga bab II bagian 2 tentang syarat syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, pasal 1320 tentang perjanjian yang berbunyi

“Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.”

Pasal 1321-1338 KUHPperdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang dijanjikan.⁵⁰

3. Pasal 1548 KUHPperdata

Dalam buku ketiga KUHPperdata bab VII sewa menyewa bagian 1 ketentuan umum, pasal 1548 KUHPperdata berbunyi:

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Pasal.”⁵¹

c. Mekanisme Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal, masing masing pihak sepakat mengenai hak dan kewajiban nya, termaksud dalam keadaan yang tak diinginkannya pada saat perjanjian berlangsung. Perjanjian sewa menyewa terjadi

⁵⁰KUHPperdata Bab II Pasal 1320, Terkait Sewa Menyewa.

⁵¹KUHPperdata, *Ibid*.

karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak satu (penyewa) mengikatkan diri untuk menikmati barang yang disewakan dan pihak lain (pemilik sewa) menerima pembayaran uang, kedua belah pihak menyepakati jangka waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang disanggupi dilakukan perjanjian lisan ataupun tertulis.⁵²

Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain, sehingga dinyatakan mengingkari isi perjanjian maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan jika pihak yang melanggar peraturan dalam perjanjian, pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar melawan hukum. Dalam proses nya perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak harus membuat suatu perjanjian agar tidak ada kesalahpahaman untuk kedepan nya, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian yaitu⁵³:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.
4. Adanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa
5. Adanya subjek dan objek yang jelas dalam sewa menyewa
6. Adanya hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan hak kewajiban pihak penyewa.

⁵²Waty Tarigan, Syafrida "Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Bandara Udara pada PT Persero Angkasa Pora II Bandar Udara Polonia Medan tahun 2017", *Thesis*, Sekolah Pasca Sarjana USU, Program Studi Kearsipan, h. 40.

⁵³*Ibid*, h. 41-42.

7. Adanyabentuk dan substansi perjanjian sewa menyewa serta resiko atas musnahnya barang.
8. Apabila kedua belah pihak setuju akan perjanjian tersebut, maka terjadinya kesepakatan itu dalam bentuk kontrak yang sudah disepakati.

2. Teori Biaya

Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam nilai moneter, untuk mencapai tujuan pada kurun waktu tertentu. Adapun pengertian teori biaya menurut para ahli.

Menurut Supriyono biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.⁵⁴

Menurut Henry Simamora, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan member manfaat pada saat ini atau dimasa mendatang bagi organisasi.⁵⁵

Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.⁵⁶

Menurut Harahap, teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input (biaya) yang paling efisien untuk menghasilkan output (produksi) tertentu. Dengan

⁵⁴Supriyono, *Akuntansi Biaya dan Pengumpulan Biaya* (Yogyakarta: Ekonesia, 2011), h. 20.

⁵⁵ Simmora, henry, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2001), h. 32.

⁵⁶Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Cet Ke. 2, h. 9.

demikian, maka teori biaya digunakan untuk menentukan tingkat output (produksi) yang optimum dengan biaya minimum, dan biaya sama dengan fungsi (produksi) analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan “teknologi yang tepat, dan yang cocok dengan kondisi perusahaan”, dengan biaya minimum.⁵⁷

Untuk memahami arti biaya seseorang harus memahami proses yang digunakan dalam menentukan biaya. Biaya adalah kas atau nilai yang setara kas yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat dalam bentuk pendapatan dimasa kini maupun masa mendatang. Dengan demikian biaya digunakan untuk manfaat dalam pendapatan. Adapun jenis jenis biaya adalah⁵⁸:

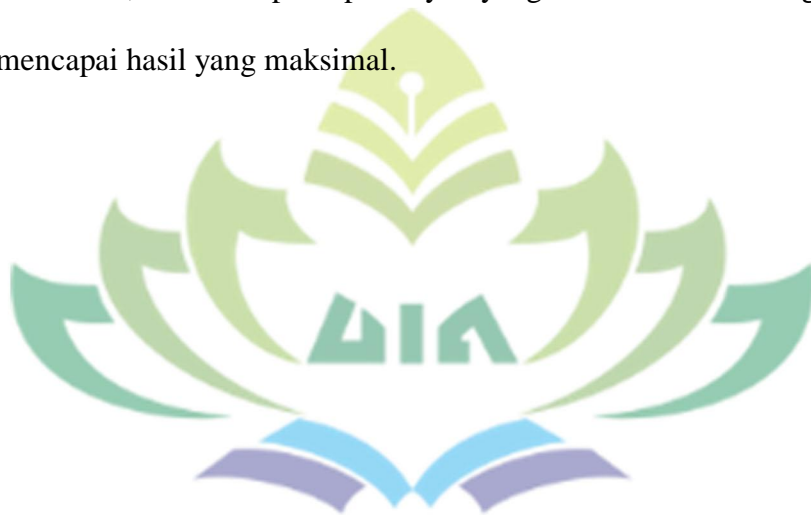
- a. Biaya tetap ialah biaya yang secara relatif tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi
- b. Biaya tidak tetap ialah biaya yang volumenya dipengaruhi oleh banyaknya output.
- c. Biaya total ialah jumlah dari biaya biaya tetap dan tidak tetap.
- d. Biaya berdasarkan lama penggunaanya

⁵⁷ Harahap, Sofyan, S, *Analisis Kritis Terhadap Laporan Keuangan* (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2007), h. 240.

⁵⁸ Carter Wilam K, dan Usry, Milion, F, *Akuntansi Biaya* Dialibahasakan oleh Krista (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 57.

- e. Biaya investasi ialah biaya yang kegunaanya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama
- f. Biaya operasional ialah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat.
- g. Biaya pemeliharaan ialah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu barang investasi agar terus berfungsi.

Teori biaya memegang peranan penting dalam analisa perilaku konsumen, karena prinsip biaya yang seminimum mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal.



3. Sewa-Menyewa Dalam Islam

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah sewa-menyewa, dalam fiqh Islam disebut "*ijarah*". *Al-ijrah* menurut bahasa dirtikan sebagai "*al-ajru*" yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (*upah*). Sedangkan menurut istilah *al-ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.⁵⁹

Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata *ijarah* selalu diterjemahkan dengan "sewa-menyewa" maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang hanya untuk mengambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.⁶⁰

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.

Ada beberapa definisi menurut beberapa para ulama fiqh, yaitu :⁶¹

⁵⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

⁶⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.29.

⁶¹Ahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 55.

a. Ulama Hanafiah

Akad suatu kemanfaatan dengan pengganti.

b. Ulama Asyafi'iyah

Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tersebut.

c. Menurut Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairah

Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Sewa-menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena menganung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Sewa-menyewa disahkan syariat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma*.

a. Dasar Hukum Sewa Menyewa Dalam Islam

Sebenarnya dalam islam sendiri, khususnya Al-Qur'an hanya membahas secara umum tentang ijarah. Hal ini bukan berarti konsep ijarah tidak diatur dalam konsep syari'ah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam Al-Qur'an hanya membahas perihal sewa-menyewa, karena itu segala peraturan yang ada dalam hukum islam mempunyai landasan dasar hukum masing-masing. Yang menjadi dasar hukum ijarah iyalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya."⁶²

b) Firman Allah SWT Surat Al-Qashash (28) ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرْهُ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۖ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁶³

c) Firman Allah SWT Surat Al-Kahfi ayat 77 :

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".⁶⁴

Maksud dari ayat di atas, bahwa setiap melakukan sesuatu itu

harus ada imbalan atau upah, begitu juga dengan sewa-menyewa

harus

terdapat imbalan sesuai dengan kesepakatan awal.⁶⁵

2) Hadits

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2002), Cet Ke.7, h. 896.

⁶³*Ibid*, h. 379.

⁶⁴*Ibid*, h. 631.

⁶⁵Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Surabaya: Penerbit Asy-Asyafiyah, 2004), Cet Ke. 2. h. 236.

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadits Rasulullah juga menerangkan dasar hukum sewa menyewa antara lain :

a) Hadits dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَّمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى
مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya”(HR. Bukhari).⁶⁶

b) Hadits dari Jabir bin Abdilllah Radiyallahu anhu:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya: “Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, tidak apa apa melakukan muajjarah”. (HR. Muslim).⁶⁷

c) Hadis riwayat dari Aisyah Radiyallahu anhu:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي
عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.(HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁸

d) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radiyallahu anhu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Rasulullah bersabda “berikanlah kepada tenaga itu upahnya sebelum tenaganya kering”. (HR. Ibnu Majah).⁶⁹

⁶⁶ Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No. 1049, h. 42.

⁶⁷ *Ibid*, Hadist No. 1059, h. 45.

⁶⁸ *Ibid*, Hadist No. 1076, h. 50.

⁶⁹ *Ibid*, Hadist No. 1120, h. 76

Dalil di atas dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu tidak hanya terhadap manfaat suatu barang atau benda, akan tetapi dapat dilakukan terhadap keahlian atau profesi seseorang.⁷⁰

Ulama berbeda pendapat tentang upah tukang bekam, menurut pendapat jumhur ulama bahwa upah tukang bekam itu halal. Menurut Imam Ahmad bahwa bekam itu makruh bagi orang merdeka pekerjaan pembekam itu dan bagi tukang bekam itu membelanjakan upahnya untuk dirinya sendiri, tetapi boleh membelanjakannya untuk hamba sahaya dan juga hewan.⁷¹

Argumentasi mereka ialah hadits yang diriwayatkan oleh Malik Ahmad dan para ulama penyusun kitab sunan dengan sanad yang terdiri dari orang-orang yang terpercaya dari *mahishah*: bahwa dia pernah menanyakan Rasulullah SAW, tentang usaha pembekaman itu, lalu beliau melarangnya.⁷²

Berdasarkan dalil di atas, maka jumhur ulama pada prinsipnya telah

sepakat tentang kebolehan sewa-menyewa.⁷³ Para ahli fiqh yang melarang

sewa-menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya pada

⁷⁰Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Salemba IV, 2005), h. 23.

⁷¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 56.

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.* h. 24.

barang- barang nyata, sedang manfaat sewa-menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada.⁷⁴

Dari ayat-ayat Alquran dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukum nya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Disamping Alquran dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas.

Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah dan kendaraan yang kosong dan tida terpakai. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan kendaraan. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan kendaraan bisa menempati rumah orang lain ataupun kendaraan orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang telah disepakati bersama, tanpa harus membeli rumah atau kendaraannya.

3) *Ijma'*

Mengenai disyariat kan *ijarah*, semua ulama bersepakat, tidak seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) sekalipun ada

⁷⁴*Ibid.*

beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁷⁵

Para ulama berpendapat bahwasannya *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu manusia antara yang satu dan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan *ijarah* adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁶

Bisa dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas kedua belah pihak yang saling meringankan, serta salah satu bentuk aktivitas manusia yang berlandaskan tolong menolong yang telah dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

b. Mekanisme Sewa-Menyewa dalam Islam

Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

⁷⁵*Ibid*, h. 25.

⁷⁶M. Ali Hasan, *Ibid*, h. 105.

- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termaksud jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lainnya) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Ketelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁷⁷

Objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Seseorang yang menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan memberikan imbalan Rp.7000.000 (tujuh juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun. Begitu juga dengan seseorang yang menyewa kendaraan untuk dipakainya selama 1bulan dengan memberikan imbalan berupa uang yang sudah ditentukan, maka selama itu ia memakai kendaraan tersebut,

⁷⁷Helmi Karim, *Ibid*, h. 31.

tetapi ia tidak memiliki rumah ataupun kendaraan tersebut . dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda. Karena dalam jual beli objek nya benda sedangkan *ijarah* objeknya adalah manfaat dar sebuah benda.⁷⁸

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah benda bukan manfaat benda. Demikian pula lah tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukanlah manfaat melainkan benda.⁷⁹

Apabila akad sewa-menyewa atau *ijarah* telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah dengan kesepakatan awal yang telah disepakati, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).⁸⁰

Sewa menyewa dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syara-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Adapun, rukun sewa-menyewa ada dua golongan yang berpendapat yang pertama golongan Abu Hanifah sewa-menyewa/ *ijarah* menjadi sah hanyalah dengan ijab dan qobul, yang kedua golongan syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* itu sendiri dari mu'ajir (pihak yang diberi upah), serta mustajir (orang yang membayar *ijarah*), dan al ma'qud 'alaih (barang yang disewakan).⁸¹

⁷⁸Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 250.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.* h. 251.

⁸¹Helmi Karim, *Ibid*, h. 34.

Di dalam teknis sewa-menyewa kendaraan (benda bergerak) biasa disebut dengan rental kendaraan, *ijarah* adalah akad atau perjanjian antara pemilik rental dengan konsumen untuk menyewa suatu kendaraan, dimana rental mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhir dengan mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan pada saat disewakan.⁸² Dalam transaksi *ijarah*, rental menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh rental kepada konsumen nya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka.

Dalam pelaksanaanya, pihak rental bukan hanya menyediakan sewa kendaraannya saja melainkan juga menyediakan jasa driver Menurut jumhur ulama fiqih *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁸³ *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam kamus hukum, *ijarah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa menyewa.⁸⁴

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, yaitu merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yakni sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*Mustajir*) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*). Apabila akad

⁸² *Ibid*, h. 24.

⁸³ *Ibid*.

⁸⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 176.

sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah suatu akad timbal balik.⁸⁵

Ijarah adalah suatu akad sewa menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan ganti upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁸⁶:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
- 2) Adanya akad antara kedua belah pihak.
- 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- 4) Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- 5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

Menurut K.Masturi, ulama setempat bahwa hukumnya sah, apabila keadaan barangnya telah menetapi syarat-syarat *ma'qud alaihi* yaitu dapat dimiliki, suci, bermanfaat dan dapat diserahterimakan. Dasar hukum yang digunakan ialah dalam kitab "*Nihayatul Zain*" karangan Imam Muhammad bin Umar bin Nawawi⁸⁷:

"dan disyaratkan terhadap *ma'qud alaih*, itu harus dimiliki, suci, bias diketahui, sudah maklum baik keadaanya, ukurannya sifatnya terhadap barang yang ada tanggungan"

203. ⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004),

⁸⁶Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h. 25.

⁸⁷*Ibid*. h. 30.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas maka ijarah harus didasari dengan ijab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seseorang yang berakad dan qobul yaitu yang keluar dari pihak lain sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya.

c. Syarat dan Rukun Sewa-menyewa

1) Akad

Sewa-menyewa itu terjadi sah apabila ada ijab dan qobul, baik dalam bentuk pernyataan lain nya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

Sewa-menyewa belum dikatakan sah sebelum ijab qobul dilakukan, sebab ijab qobul menunjukkan kerelaan, pada dasarnya ijab qobul dilakukan dengan lisan, tapi kalo tidak mungkin seperti bisu atau lainnya, maka boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qobul.⁸⁸

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad yaitu orang yang menyewa (musta'jir) dan orang yang menyewakan (mu'ajir). Syarat bagi orang yang berakad ialah telah baliqh dan berakal, dengan demikian apabila orang itu belum dan tidak berakal maka ijarahnya tidak sah. Dan para pihak yang melakukan akad harus lah berbuat dengan kemauan nya sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada

⁸⁸Chairumn Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 34.

unsure paksaan, baik keterpaksaan itu datang dipihak pihak yang berakad atau dari pihak lain. Kewajiban-kewajiban dan ketentuan bagi orang yang melakukan akad adalah:⁸⁹

(1) Kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu mengizinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi rumah atau pun kendaraan dan sebagainya kepada orang yang menyewa nya serta memelihara barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya.

(2) Kewajiban bagi penyewa, yaitu membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan, membersihkan barang sewaan nya, serta mengembalikan barang sewaan nya itu bila telah habis waktunya atau ada sebab-sebab yang menyebabkan selesainya/putus nya sewa.

(3) Ketentuan bagi penyewa, yaitu⁹⁰:

(a) Barang sewaan itu merupakan amanat pada penyewa, jadi kalau terjadi kerusakan karna kelalaiannya, maka itu menjadi tanggung jawabnya

(b) Bagi orang yang menyediakan barang-barang. Boleh menggantikan barang sewaan nya dengan yang seimbang dengan barang yang semula.

⁸⁹Suhrawardi K. Libis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 51.

⁹⁰*Ibid*, h. 52.

(c) Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan pada banyaknya upah atau temponya atau ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tak ada saksi atau keterangan keterangan lain yang dapat dipertanggung jawab kan maka kedua belah pihak harus bersumpah.

Dari kewajiban dan ketentuan diatas dapat disimpulkan alangkah baik nya kalau akad sewa menyewa dilakukan secara tertulis agar tidak ada kesalahpahaman dikemudian nya.

2) Ujrah (sewa)

Disyaratkan, bahwa ujrah itu diketahui oleh kedua belah pihak, banyak jenis dan sifatnya. Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu.⁹¹

3) *Ma'qud alaih*

Ma'qud alaih adalah barang yang dijadikan objek sewa menyewa yaitu⁹²:

- a) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan, maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan dalam kondisi yang memang diperjanjikan.
- b) Objek *ijarah* itu dapat digunakan sesuai kegunaan, maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat digunakan oleh penyewa sesuai dengan barang tersebut.\

⁹¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992),. h. 24.

⁹²*Ibid*, h. 25-26

- c) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.
- d) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama.

Fatwa DSN MUI NO: 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 menetapkan mengenai ketentuan ijarah sebagai berikut:⁹³

- a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termaksud jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik
- g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa.

⁹³*Ibid*, h. 27-28.

- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lainnya) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i) Ketelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

d. Keterlambatan Pengembalian Barang Sewaan dalam Islam

Dalam sewa-menyewa tentu saja ada batas waktu yang ditentukan untuk pemakaian sewanya, apabila batas waktu tersebut sudah habis maka barang yang disewakan harus dikembalikan kepada pemilik barangnya. Karena sewa-menyewa bersifat sementara bukan menjadi hak milik si penyewa. Jika sampai batas waktunya barang yang disewa belum juga dikembalikan atau terlambat dikembalikan, maka dalam perjanjian sebelumnya tentang syarat dan ketentuannya sewa-menyewa, berarti si penyewa melanggar isi perjanjian tersebut atau lebih dikenal dengan istilah wanprestasi, maka si penyewa akan dikenakan sanksi berupa denda untuk mengganti kerugian pemilik sewa karena keterlambatan pengembalian barangnya tersebut.⁹⁴

Keterlambatan pengembalian dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi, yang mana tindakan wanprestasi sendiri dapat terdiri dari tiga perbuatan yakni⁹⁵:

- a. Pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji.
- b. Pihak berwajib lalai dalam melakukannya.

⁹⁴A.A. Pradnyaswari "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Penjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan (Rent Car)", *Jurnal Ekonomi* Vol. 2 No. 1 (Januari 2014), Publisher Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

⁹⁵Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Bale, 1981), h. 44.

- c. Pihak berwajib melaksanakan tetapi tidak secara semestinya dan dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan atas tidak terpenuhinya perjanjian dalam perikatan dapat meminta ganti rugi atau ongkos atas kerugian yang dideritanya. Adapun hal-hal terkait diatur dalam pasal 1246 KHUPerdata bahwa:

- a. Kerugian yang diderita,
- b. Keuntungan yang seharusnya diterima.

Menurut pandangan Islam sewa-menyewa atau *Ijarah* didefinisikan dengan akad jual beli jasa atau manfaat dari suatu benda.⁹⁶ Agar terdapat kejelasan didalamnya maka setiap akad yang dilakukan harus terdapat batasannya.⁹⁷ Pada akad jual beli barang yang menjadi batasan adalah kuantitas atau jumlahnya dapat menggunakan berat atau volum barang tersebut. Sementara dalam akad jual beli jasa atau manfaat suatu barang, batasan yang digunakan adalah waktu atau target tertentu. Penetapan batasan ini dilakukan dalam rangka menghindari unsur ketidakjelasan dalam transaksi atau jual beli yang sifatnya *gharar*.⁹⁸ Dalam kitab *Al-Fawakih ad-Dawani* (kitab madzab malikiyah) dinyatakan:

"Semua akad jual beli, sewa-menyewa, atau sewa tanah, jika disana disana ada untung-untungan atau ketidakjelasan, baik dalam harga maupun objek akad atau batas waktunya, hukumnya tidak boleh".⁹⁹

⁹⁶Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h. 25.

⁹⁷*Ibid*.

⁹⁸*Ibid*.

⁹⁹An- Nafrawi, Ahmad, *Kitab Al-Fawakih ad-Dawani Juz II* (Beirut: Daar Al - Kutub Al-Ilmiyah), 1418H), h. 79.

Oleh sebab itu, maka ketika seseorang melakukan akad sewa haruslah ditentukan batas waktunya. Pada kondisi ketika penyewa tidak mengembalikan barang tepat waktu maka hal yang dapat dilakukan adalah¹⁰⁰:

a. Tertunda hingga senilai satu paket harga sewa

Sebagai contoh si A menyewa mobil dari sebuah rental dengan harga Rp 300,000/hari selama 3 hari. Ternyata si A baru mengembalikan mobil di akhir hari ke-5. Berdasarkan kasus tersebut maka si A dinyatakan terlambat mengembalikan barang sewaan selama 2 hari, oleh sebab itu dalam hal ini maka pemilik rental berhak meminta pembayaran sewa mobil selama 5 hari kepada si A. Sewa merupakan sebuah akad lazim, sehingga dalam kondisi apapun tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selain itu sifatnya juga mengikat jika terdapat penambahan volum waktunya.

Berdasarkan *Ar-raudhul Murbi'* yang merupakan buku fiqih hambali menyatakan:

"Jika penyewa mengembalikan barang sebelum selesai masa sewa maka ia harus membayar semua biaya sewa. Sebab sewa merupakan akad lazim (mengikat) sehingga segala konsekuensi harus dijalankan, dimana pemilik barang berhak memiliki biaya sewa dan penyewa berhak mendapatkan manfaat dari barang".¹⁰¹

b. Tertunda namun tidak senilai satu paket biaya sewa

¹⁰⁰Ustadz Ammi Nur Baits, *Denda Telat Mengembalikan barang Sewa*, (Artikel Publikasi tersedia online) di [https:// pengusahamuslim.com](https://pengusahamuslim.com) diakses pada 29 November 2019).

¹⁰¹Syaikh Manshur bin Yunus Al-Bahuty, *Kitab Ar-Raudhul Murbi' Syarh Zadul Mustaqni Mesir* (Mesir: Dar ats-Tsuraya, 1423H/2002M), h. 268.

Contoh kasus sebagaimana kasus diatas, namun si A hanya telat melakukan pengembalian 3 jam dari waktu yang ditentukan maka dalam kondisi ini pemilik mobil boleh meminta tambahan biaya atau denda atas keterlambatan selama 3 jam tadi. Denda dalam hal ini bukan denda karena transaksi hutang piutang sehingga tentu saja hal ini diperbolehkan, karena denda yang diminta semakna dengan biaya ganti dari nilai sewa atas keterlambatan selama 3 jam dalam mengembalikan barang sewaan.¹⁰²

Majma' al-Fiqh al-Islami dalam muqtamarnya ke 12 di Riyad 1421 H, membahas tentang as-syarthul jaza'I (ketentuan atas denda bagi pihak yang menyalahi kesepakatan), menghasilkan beberapa keputusan antara lain:

"Boleh menetapkan ketentuan ada denda dalam sebuah akad terkait harta, selain akad yang tanggung jawab aslinya berbasis hutang piutang karena ini jelas riba nya (keputusan nomor 4)".¹⁰³

Sewa menyewa bukanlah transaksi hutang piutang, oleh sebab itu mengambil denda karena adanya telat mengembalikan barang sewa adalah diperbolehkan dan hal tersebut bukanlah riba.¹⁰⁴

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada penelusuran kepustakaan yang telah peneliti lakukan pada berbagai sumber, pembahasan dan kajian mengenai wacana sewaa-menyewa kendaraan sebelumnya telah banyak dilakukan. Guna mendukung penelitian ini maka peneliti telah melakukan penelusuran ke berbagai literatur yang ada, diantaranya.

¹⁰²Ustadz Ammi Nur Baits, *Ibid.*

¹⁰³*Majma' al-Fiqh al-Islami* Muqtamar ke-12 di Riyad 1421H membahas tentang as-syarthul jaza'I (keputusan nomor 4). Dalam Ustadz Ammi Nur Baits, *Ibid.*

¹⁰⁴Ustadz Ammi Nur Baits, *Ibid.*

Penelitian yang dilakukan oleh Agista Nada Maya pada tahun 2014 dengan judul "Praktek Sewa-Menyewa Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoharjo" penelitian ini mengambil cakupan pembahasan yang menjadi permasalahan adalah sistem sewa mobil lepas kunci dimana kerap terjadi keterlambatan pengembalian, penipuan hingga meminjamkan mobil sewaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penyewa.¹⁰⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Hendrawan pada tahun 2015- dengan judul "Wanprestasi dan Penyelesaian dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen)". Secara umum menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa mobil yang dilakukan Wawa Rental Mobil Sragen, pada praktiknya sewa-menyewa yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi tindakan wanprestasi akibat dari kelalaian pihak penyewa, terhadap tindakan tersebut maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan jika tidak ditemukan jalan tengah maka akan dilanjutkan ke persidangan.¹⁰⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Febriana Claudia P. tahun 2015 dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV. Dawung Putra Makmur". Pada penelitian ini penyelesaian untuk tindakan wanprestasi dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat dimana kedua belah pihak bertemu yakni pihak penyewa dan pihak yang memberikan sewa dalam

¹⁰⁵ Agista Nada Maya "Praktek Sewa-Menyewa Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoharjo", *Jurnal Az Zarga* Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 21-45.

¹⁰⁶ Wawan Hendrawan -dengan judul "Wanprestasi dan Penyelesaian dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen)" *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* Vol. 3 No. 1 (Desember 2015) Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, h. 132-150.

satu forum untuk membicarakan masalah yang terjadi dan kemudian menemukan jalan tengah yang sesuai untuk permasalahan tersebut.¹⁰⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Benedictus pada tahun 2016 mengenai "Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Kajian Kasus pada CV. ASRI)". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa yang dilakukn antara pihak CV. ASRI dengan penyewa ataupun pihak ketiga telah mendapatkan perlindungan hukum, sehingga baik pihak penyewa ataupun pihak ketiga tidk dibebani tanggung jawab atas terjadinya kerusakan kepada mobil sewaan, sebab hal tersebut telah ditranggung oleh Asuransi Wahana.¹⁰⁸

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, penelitian yang terkait dengan sewa-menyewa kendaraan khususnya mobil memang telah ada, namun terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni pada objek sewa, problematika serta penyelesaian yang dilakukan. Pada skripsi ini penulis memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap biaya tambahan keterlambatan pengembalian dalam praktek sewa-menyewa di CV. Bintang Ankara Rental Bandar Lampung.

¹⁰⁷Febriana Claudia P. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV. Dawung Putra Makmur", *Artikel Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015, h. 18.

¹⁰⁸Benedictus "perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Kajian Kasus pada CV. ASRI)", *Jurnal Az Zarga* Vol. 4 No. 3 (Desember 2016), Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 54-74.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bandung, Cet.I.
- Ahmat Syafei, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2011, *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, Bandung: Sygma Publishing.
- Amir Syarifuddin, 1997, *Ushul Fiqh Jilid Logos Wacana Ilmu* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- An-Nafrawi, Ahmad, 1418H, *Kitab Al-Fawakih ad-Dawani Juz II* , Beirut: Daar Al - Kutub Al-Ilmiyah.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Carter Wilam K, dan Usry, Milion, F, 2004, *Akuntansi Biaya* Dialibahasakan oleh Krista, Jakarta: Salemba Empat.
- Chairumn Pasaribu, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, Cet Ke.7.
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Salemba IV.
- Faturahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Hasal Alwi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Helmi Karim, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, 2004, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Surabaya: Penerbit Asy-Asyafiyah, Cet Ke. 2.
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Yahya Harahap, 2008, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Mulyadi, 2012, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, Cet Ke. 2.
- Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *KUHPerdata*, Jakarta: PT.Pradya Paramita.
- Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-13.
- Suhrawardi K. Libis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyono, 2011, *Akuntansi Biaya dan Pengumpulan Biaya*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Susiadi , AS., 2015, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syaikh Manshur bin Yunus Al-Bahuty, 1423H/2002M, *Kitab Ar-Raudhul Murbi' Syarh Zadul Mustaqni Mesir*, Mesir: Dar ats-Tsuraya.
- Tobing, David Hizkian, dkk, 2017, *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*, Bali: Universitas Udyana.

W.J.S Purdawadarminta, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Waty Tarigan, Syafrida "Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Bandara Udara pada PT Persero Angkasa Pora II Bandar Udara Polonia Medan tahun 2017", *Thesis*, Sekolah Pasca Sarjana USU, Program Studi Kearsipan.

Wirdjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Bale.

Wiryono Prodjodikoro H., 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, Cet Ke. 7.

B. Jurnal

A.A. Pradnyaswari "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan (Rent Car)", *Jurnal Ekonomi* Vol. 2 No. 1 (Januari 2014), Publisher Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar.

Agista Nada Maya "Praktek Sewa-Menyewa Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoharjo", *Jurnal Az Zarga* Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 21-45.

Benedictus "perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Kajian Kasus pada CV. ASRI)", *Jurnal Az Zarga* Vol. 4 No. 3 (Desember 2016), Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 54-74.

Febriana Claudia P. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV. Dawung Putra Makmur", *Artikel Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015, h. 18.

Mikha Ekapasi Putra Kawangmani, "Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dampak Ekonomi dan Potensi Lakalantas", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan (JIEP)*, Vol. 17, No. 1, (Maret 2017).

Ni Putu Dian Pradnyawati, Ratna Arta Windari, Ketut Sudiatmaka, "Akibat Hukum Terjadinya Wanpretasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di Kabupaten Klungkung", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2008).

Wawan Hendrawan -dengan judul "Wanprestasi dan Penyelesaian dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen" *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* Vol. 3 No.

1 (Desember 2015) Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembag, h. 132-150.

B. Media Online

Ustadz Ammi Nur Baits, *Denda Telat Mengembalikan barang Sewa*, (Artikel Publikasi tersedia onlie) di [https:// pengusahamuslim.com](https://pengusahamuslim.com) diakses pada 29 November 2019).

